

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

SKRIPSI



Nama : INTAN PURNAMASARI
NIM : 222016133

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

SKRIPSI

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : INTAN PURNAMASARI
NIM : 222016133**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**


PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Intan Purnamasari
NIM : 222016133
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana S1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbeparan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Februari 2020

Intan Purnamasari

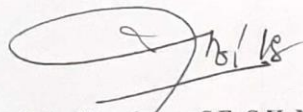
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim
Nama : Intan Purnamasari
NIM : 222016133
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

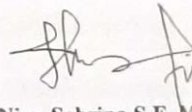
Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Februari 2020

Pembimbing I,



M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si
NIDN/NBM: 0204076802/843951

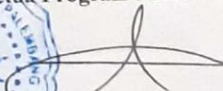
Pembimbing II,



Nina Sabrina, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0216056801/851119

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Akuntansi




Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., AK., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO

- *Kembalilah Kepada Tuhan-mu dengan Ridha (Puas),
dan Diridhai.*

(Q.S AL - FAJR: 28)

- *Saya yakin, segala sesuatu yang saya lakukan dan
perjuangkan di dunia ini tidak ada yang sia - sia*

(Penulis)

Kupersembahkan skripsi ini kepada

- 1. Ibu dan Ayah Tercinta*
- 2. Keluarga Besar*
- 3. Kakak & Ayukku*
- 4. Dosen Pembimbing*
- 5. Sahabatku*
- 6. Almamaterku*

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alikum Rr.Wb.

Alhamdulillah robbil'alamiin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim**” dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan penuh rasa hormat, cinta, kasih sayang dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan terkhusus kepada kedua orang tua, A.Bahrin dan Nurul Huda yang sangat berjasa dalam mendidik, mendoakan, memberi semangat dan motivasi, serta telah membesarkan penuh dengan penuh cinta, kasih sayang tanpa keluh kesah. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Orba Kurniawan, S.E.,M.Si selaku pembimbing 1 dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas serta penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripso ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak kekurangan, hal ini mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis, baik dari segi ilmu ataupun pengalaman. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan,

dorongan, serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak M. Fahmi, S.E.,M.Si selaku pembimbing akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penyusunan skripsi ini.
7. Saudara-Saudariku yang telah banyak membantu dan memberikan dalam penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal yang dilakukan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2020
Penulis,

Intan Purnamasari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	18
A. Landasan Teori	18
1. Pendapatan Asli Daerah	18
a. Pengertian pendapatan asli daerah	18
b. Klasifikasi pendapatan asli daerah	19

c. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah	20
d. Sumber-sumber yang mempengaruhi pendapatan asli daerah	20
e. Sumber pendapatan atau penerimaan daerah	22
2. Pajak Daerah	24
a. Pengertian pajak daerah	24
b. Fungsi pajak daerah	25
c. Prinsip – prinsip pajak daerah	28
d. Jenis – jenis pajak daerah	31
e. Tata cara pemungutan pajak	34
B. Penelitian Sebelumnya	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Operasionalisasi Variabel	39
D. Data yang Diperlukan	40
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. HASIL PENELITIAN	43
1. Data Umum	43
a. Gambaran Umum Kabupaten Muara Enim	43
b. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten	

Muara Enim	48
c. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten	
Muara Enim	50
d. Struktur Organisasi	51
2. Aktivitas	59
B. Hasil Pembahasan	60
1. Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan	
Pendapatan Asli Daerah	60
a. Analisis Pajak Daerah	60
1) Pajak Hotel	61
2) Pajak Restoran	62
3) Pajak Hiburan	63
4) Pajak Reklame	64
5) Pajak Penerangan Jalan	66
6) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	66
7) Pajak Air Tanah	67
8) Pajak Sarang Burung Wallet	68
9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	69
10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	70
b. Analisis Pendapatan Daerah	71
1) Realisasi Pajak Daerah tahun 2014-2018	72
2) Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2014-2018	74

2. Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Muara Enim	75
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	80
A. Simpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim	11
Tabel I.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2014	12
Tabel I.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2015	13
Tabel I.4 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016	14
Tabel I.5 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2017	14
Tabel I.6 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2018	15
Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya	37
Tabel III.1 Operaionalisasi Variabel	39
Tabel IV.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah	61
Tabel IV.2 Target dan Realisasi Pajak Hotel	62
Tabel IV.3 Target dan Realisasi Pajak Restoran	63
Tabel IV.4 Target dan Realisasi Pajak Hiburan	64
Tabel IV.5 Target dan Realisasi Pajak Reklame	65
Tabel IV.6 Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan	66
Tabel IV.7 Target dan Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ..	67
Tabel IV.8 Target dan Realisasi Pajak Air Tanah	68
Tabel IV.9 Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Wallet	69
Tabel IV.10 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan perkotaan	70
Tabel IV.11 Target dan Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan	71
Tabel IV.12 Target dan Realisasi Pajak Daerah tahun 2014-2018	72
Tabel IV.13 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2014-2018	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi	51

HALAMAN LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian/Survey/Riset

Lampiran 2 Kartu Aktivitas Bimbingan

Lampiran 3 Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Quran

Lampiran 4 Sertifikat Toefel

Lampiran 5 Plagiarisme Checker X Originality Report

Lampiran 6 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim

Lampiran 7 Biodata Penulis

ABSTRAK

Intan Purnamasari/222016133/2020/Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim dan bagaimanakah upaya pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim dan untuk mengetahui upaya pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Muara Enim. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dokumentasi dan laporan realisasi pendapatan asli daerah. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini data kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah pajak daerah berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten muara enim dimana peningkatan penerimaan pajak daerah meningkat yaitu tahun 2018 penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 72,38%. Dari 10 (sepuluh) unsure pajak daerah ada 4 unsur yang paling berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet.

Kata Kunci : Penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah

Abstract

Intan Purnamasari / 222016133/2020 / The Analysis of Local Tax Receipts in Increasing Original Local Revenue (PAD) of Kabupaten Muara Enim.

The problem of this study was how the local tax receipt in increasing original local revenue (PAD) of Kabupaten Muara Enim and how the efforts of local tax in increasing original local revenue (PAD) of Kabupaten Muara Enim. The objective of this study was to find out the local tax receipts in increasing original local revenue (PAD) of Kabupaten Muara Enim and the efforts of local tax in increasing original local revenue (PAD) of Kabupaten Muara Enim. This research was conducted at Kabupaten Muara Enim. The type of research used was descriptive study. The data used in this study was secondary data. Data collection methods used in this study were documentation and original local revenue realization report. Analysis of the data used in this study was qualitative data. The results of this study were local taxes play a role in increasing the original local revenue of Muara Enim where the increase in local tax receipts increased that in 2018, the local tax receipts increased by 72.38%. From 10 (ten) elements of local tax, there were 4 elements that have the most role in increasing local tax receipts, namely hotel tax, restaurant tax, advertisement tax, street lighting tax, nonmetallic mineral and rock tax, groundwater tax, swallow's nest tax.

Keywords: local tax receipts in increasing original local revenue

PENGESAHAN
NO. 124 / Abstract / LB UMP / 1 / 20 20
Telah di Koreksi oleh
Lembaga Bahasa
Universitas Muhammadiyah Palembang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang tersebar dengan berbagai suku dan budaya. Letak wilayah menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi dan pendapatan di masing-masing daerah mengalami perbedaan. Hal ini menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk dapat memanfaatkan segala aspek dalam upaya peningkatan terhadap penerimaan daerah. Diberlakukannya otonomi daerah membuat setiap daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur dan mengelola semua urusan pemerintah daerah sebagaimana yang telah di atur oleh Undang-undang. Dengan demikian maka daerah juga berkewenangan membuat kebijakan daerah guna menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka pendapatan asli daerah juga harus mampu menopang kebutuhankebutuhan daerah bahkan diharapkan tiap tahunnya pendapatan asli daerah akan selalu meningkat.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Pemerintah Daerah untuk lebih bijak dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, agar dapat menerapkan otonomi daerah dengan melakukan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah dan tidak bergantung subsidi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan daerah salah satunya dengan meningkatkan PAD. Untuk mengoptimalkan PAD beberapa pos PAD harus ditingkatkan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelajaran daerah, jika PAD meningkat daerah akan bertambah sehingga mampu mendorong tingkat kemandirian daerah tersebut.

Menurut Waluyo (2014:8), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Oleh sebab itu Pendapatan Asli Daerah harus dikembangkan dengan cara perluasan basis penerimaan Pajak dan Retribusi, dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia sejak Indonesia merdeka sampai saat ini PAD telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan dalam memberikan kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain PAD yang sah. Tujuan PAD adalah untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak

adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2016).

Pajak daerah adalah Pemungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Salah satu pos penerimaan asli daerah (PAD) dalam APBD adalah pajak daerah. (Aris, 2012:89).

Menurut dasar hukum UU N0. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), sebagai pengganti dari UU N0. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (daerah), sebagai berikut: “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Penelitian yang dilakukan oleh Elvi (2015), Ventje (2015), Inggriani (2015), Hasil penelitian menunjukkan tingkat pertumbuhan PAD Maluku Utara tahun 2013-2014 sebesar 22,53%. Penerimaan Pajak Daerah dalam meningkatkan PAD dari target dan realisasi tahun 2013-2014 yang memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pajak daerah adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu sebesar 58,62%, namun pada tahun 2014 dari realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor mengalami penurunan kontribusi yaitu sebesar 44,05%. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar 77.57%. Sebaiknya Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara meningkatkan potensi penerimaan Pajak Daerah karena dengan peningkatan penerimaan pajak daerah akan berpengaruh pada peningkatan PAD.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017), Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Langkat belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Banyak wajib pajak yang susah untuk membayar pajak. Dapat juga dilihat dari kontribusi pajak daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Langkat belum dapat menjalankan otonomi daerah secara konsekuen karena masih tergantung dari penerimaan lain diluar penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah. Dari Sistem Penerimaan Pajak daerah pada Pemerintahan Kabupaten Langkat menggunakan *with holding system* untuk setiap jenis-jenis pajak daerah dimana dengan menggunakan sistem ini memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan pajak daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2016), Hasil analisis menunjukkan rata-rata proporsi realisasi penerimaan pajak daerah terhadap total pajak daerah di Kota Jambi tahun 2001-2013 terbesar adalah proporsi pajak penerangan jalan. Sedangkan komponen pajak daerah yang menyumbang terkecil terhadap total penerimaan pajak daerah tahun 2001-2013 adalah pajak galian. Selama periode tahun 2001-2013, rata-rata pendapatan perkapita penduduk Kota Jambi adalah sebesar 6.080.453. Selanjutnya berdasarkan analisis regresi diperoleh bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan perkapita Kota Jambi.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2018), Widhi (2018), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara silmultan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung periode tahun 2009 – 2015.

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim, provinsi Sumatera Selatan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim bertanggung jawab untuk urusan pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.

Selain itu, Badan Pendapatan Daerah atau juga dikenal dengan singkatan Bapenda memiliki tugas dan fungsi lainnya. Bapenda memiliki

tugas utama yaitu sebagai penyelenggara untuk pemungutan pendapatan daerah wilayah kerjanya dan sebagai koordinator instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi pemungutan pendapatan daerah. Untuk fungsi Bapenda adalah merumuskan kebijakan bidang pendapatan daerah, pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya, pemungutan pendapatan daerah, penyuluhan pajak, pemberian izin bidang pendapatan daerah, penyusunan rencana pendapatan daerah, hingga evaluasi pendapatan daerahnya. Beberapa sumber pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawab Bapenda ialah pengawasan penerimaan pajak baik pajak rumah bagunanan, tanah, kendaraan motor dan mobil, PBB perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB), pajak parkir mobil dan motor di wilayahnya. Terkait dengan hal itu, Bapenda memiliki wewenang untuk menerbitkan izin-izin tertentu sesuai dengan fungsi dan tugasnya seperti surat izin pembangunan dan pengadaan billboard, izin pengadaan lahan parkir, izin reklame, dan lainnya.

Kabupaten Muara Enim memang memiliki aneka potensi yang berlimpah, tidak saja di sektor energi (migas dan nonmigas) tapi juga di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertanian. Hamparan kebun kopi yang menghijau di dataran tinggi tiga kecamatan Semendo dan Tanjung Agung, dengan luasan mencapai 23.449 hektare, karet (149.276 ha) dan sawit (22.810 ha) tersebar di hampir seluruh wilayah kecamatan kecuali Semendo. Lalu potensi perikanan di wilayah sepanjang aliran Sungai Lematang.

Begitu pula dengan potensi energi, daerah ini memiliki kekayaan berlimpah baik berupa batubara (di Kecamatan Lawang Kidul dan Tanjung Agung), minyak bumi (di Benakat, Rambang Dangku, Lubai dan Gelumbang), panas bumi atau *geothermal* (di Semendo) serta potensi gas yang saat ini belum banyak dimanfaatkan (di Kecamatan Benakat, Ujan Mas, Gunung Megang, Rambang Dangku dan Lubai).

Bermodal kekayaan potensi itulah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim berpacu meningkatkan pembangunan dari tahun ke tahun, yang pada akhirnya diharapkan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Muara Enim, yakni SMAS (Sehat, Mandiri, Agamis dan Sejahtera), Caranya, sejumlah langkah ditempuh, baik dengan membuat sejumlah kebijakan, perencanaan, evaluasi secara berkala dan upaya lain agar hasil yang dicapai terus meningkat dari waktu ke waktu.

Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan pemetaan potensi-potensi tadi, berdasarkan pendekatan geografis. Dari situ kemudian disusun strategi, arah dan sasaran yang ingin dicapai, dengan menetapkan pedoman dan skala prioritas pengembangan. Telah ditetapkan, lima sektor prioritas pembangunan, yakni (1) Penanggulangan kemiskinan. (2) Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. (3) Penyediaan Infrastruktur Sosial Ekonomi. (4) Revitalisasi Komoditi Unggulan Pertanian, dan (5) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Untuk itu,

pemetaan dilakukan, baik pemetaan strategi, pemetaan potensi, maupun pemetaan tata ruang wilayah, untuk mana dimaksudkan, agar langkah yang dilakukan mengarah pada sasaran dan tujuan yang ingin dicapai.

Faktor keunggulan dan kekurangan juga diidentifikasi, agar pembangunan yang dijalankan tidak salah arah, melainkan tepat sasaran. Besarnya potensi yang dimiliki, tingginya angkatan kerja, serta rendahnya angka kriminalitas dan ketimpangan social, merupakan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pembangunan. Sebaliknya, angka kemiskinan yang masih cukup tinggi, tingkat pengangguran yang besar serta belum optimalnya daya dukung dari fasilitas social dan infrastruktur, mmerupakan factor penghambat yang senantiasa dicermati. Begitu pula dalam hal penyusunan kebijakan. Meningkatnya laju impor produk, dipandang dapat mematikan usaha lokal. Begitu pula tren ketertarikan investor hanya pada sector ekonomi strategis, dan terbukanya pasar bebas di kawasan Asia Tenggara yang memicu persaingan secara terbuka, diwaspadai sebagai ancaman besar, jika tak diimbangi dengan melahirkan kebijakan yang bersifat melindungi bagi kelangsungan perekonomian masyarakat. Dan sejauh ini, hasil yang dicapai cukup menggembirakan, meski belum sesuai seperti yang ditargetkan, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim, meski mengalami peningkatan tapi lajunya mengalami perlambatan dibanding lima tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 yang hanya 4,98 persen dengan migas dan 6,94 persen bila tanpa migas, lebih

lamban dibanding tahun 2013 yang mencapai 5,44 persen dengan migas dan 8,11 persen dengan tanpa migas. Memang, perlambatan itu lebih disebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian, yang merupakan dua sektor andalan dan selama ini memberi andil terbesar dalam mendukung perekonomian di daerah ini. Tapi ini menjadi petunjuk kuat, bahwa daerah ini masih sangat bergantung pada dua sektor andalan tersebut.

Di sektor pertanian misalnya, penurunan banyak dipengaruhi lesunya harga kopi, karet dan sawit yang merupakan tiga komoditi andalan Kabupaten Muara Enim, akibat pengaruh ekonomi global. Demikian pula di sektor pertambangan, dengan jatuh dan belum kembali normalnya harga batubara di pasar dunia. Jika saja, sektor perindustrian telah lebih dulu tumbuh dan berkembang di daerah ini, maka bisa jadi ceritanya akan lain. Dengan adanya aktifitas perindustrian berbasis hulu ditandai dengan tumbuh dan munculnya banyak pabrik yang mengolah aneka potensi yang dimiliki daerah ini, maka pertumbuhan ekonomi daerah ini diyakini akan bisa berjalan normal, bahkan terus meningkat.

Kabupaten Muara Enim memiliki komitmen kuat untuk pengembangan industri di daerah ini. Tidak saja dengan membuat Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW (Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2012), tapi juga dalam bentuk berbagai kebijakan yang dibuat untuk maksud itu. Tapi itu semua belum bisa diwujudkan, dan jika tak lekas diambil percepatan langkah, bukan tidak

mungkin tren penurunan capaian pertumbuhan ekonomi itu akan terus melambat bahkan cenderung menurun ke bawah. (<https://kabarserasan.com/2016/11/01/muara-enim-wilayah-dengan-potensi-berlimpah/>).

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Mayor Tjik Agoes Kiemas, SH (Komplek Islamic Center) sebagai pelaksanaan pemerintah daerah secara aktif melakukan upaya pembangunan sumber. Sumber pendapatan daerah untuk mencapai itu pemerintah harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah yang dikelola secara efektif dan efisien. Bentuk dan jenis Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh daerah diartinya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara aktif dan nyata dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.1
Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Muara Enim
2014-2018

Tahun	Pajak Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2014	40.689.229.197,00	47.806.660.511,00	138.348.636.341,00	138.705.896.244,15
2015	65.230.418.945,00	70.755.225.873,05	182.898.761.175,00	178.245.088.810,87
2016	51.767.967.010,00	52.948.650.682,50	165.236.124.689,05	150.912.522.963,17
2017	56.346.779.302,00	62.718.676.208,53	280.607.694.873,39	226.929.233.264,54
2018	95.383.083.081,00	69.037.972.075,62	227.589.318.925,71	232.468.708.584,45

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim, 2019

Berdasarkan tabel I.1 di tahun 2015 dari Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang tidak mencapai target yaitu, Pendapatan Asli daerah dengan Persentase 97,46%. Pada tahun 2016 dari Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang tidak mencapai target yaitu, Pendapatan Asli

daerah dengan Persentase 91,33%. Pada tahun 2017 dari Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang tidak mencapai target yaitu, Pendapatan Asli daerah dengan Persentase 80,87%.

Pada tahun 2018 dari Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang tidak mencapai target yaitu, Pajak Daerah dengan persentase 72,38%. Pajak Daerah pada tahun 2018 yang tidak mencapai target yaitu pajak hiburan dengan persentase 92,29%, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan persentase 79,92%, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan persentase 12,52%.

Dari penjelasan tersebut pajak-pajak daerah yang tidak mencapai target dari tahun 2014-2018 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pajak Daerah
Tahun 2014

Keterangan	Target	Realisasi	Persentase
Pajak Hotel	690.560.000,00	622.526.032,00	90,15%
Pajak Restoran	3.185.344.098,00	4.659.926.430,00	146,29%
Pajak Hiburan	45.000.000,00	83.059.318,00	184,58%
Pajak Reklame	407.000.000,00	456.245.003,00	112,10%
Pajak Penerang Jalan	14.300.000.000,00	18.138.087.208,00	126,84%
Pajak Air Tanah	27.000.000,00	42.091.107,00	155,89%
Pajak Sarang Burung Wallow	52.500.000,00	42.358.200,00	80,68%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.000.000.000,00	10.825.762.271,00	98,42%
Pajak Bumi dan Bangunan	8.481.825.099,00	7.057.630.806,00	83,21%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.500.000.000,00	5.879.174.136,00	235,17%
Total	40.689.229.197,00	47.806.660.511,00	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim

Dari tabel 1.2 dapat dilihat pada tahun 2014 pajak daerah yang tidak mencapai target yaitu, pajak hotel dengan persentase 90,15%, dikarenakan

tidak mencapai target dikarenakan ada hotel-hotel yang melaporkan tutup usaha namun ada juga hotel hotel-hotel baru dan berkembang karena melihat potensi yang bisa dimanfaatkan dari tingginya wisatawan yang membutuhkan jasa penginapan. Pajak daerah yang tidak mencapai target tahun 2014 yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan dengan persentase 98,42%, dikarenakan objek pajak berupa pasir dan jumlah yang melakukan penggalian semakin berkurang. Pajak daerah yang tidak mencapai target tahun 2014 yaitu pajak bumi dan bangunan dengan persentase 83,21%, dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Pajak Daerah
Tahun 2015

Keterangan	Target	Realisasi	Persentase
Pajak Hotel	592.849.412,00	713.421.544,00	120,34%
Pajak Restoran	4.193.000.000,00	5.530.391.385,00	131,90%
Pajak Hiburan	103.000.000,00	147.506.532,00	143,21%
Pajak Reklame	423.000.000,00	495.141.913,00	117,05%
Pajak Penerang Jalan	18.000.000.000,00	21.283.537.601,00	118,24%
Pajak Air Tanah	30.000.000,00	31.196.168,00	103,99%
Pajak Sarang Burung Wallow	45.000.000,00	46.778.000,00	103,95%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.000.000.000,00	11.276.133.021,00	125,29%
Pajak Bumi dan Bangunan	12.843.569.533,00	7.826.505.167,00	60,94%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	20.000.000.000,00	23.404.614.442,05	117,02%
Total	65.230.418.945,00	70.755.225.873,05	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim

Dari tabel 1.3 dapat dilihat pada tahun 2015 pajak daerah yang tidak mencapai target yaitu, pajak bumi dan bangunan dengan persentase 60,94%, dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Tabel 1.4
Target dan Realisasi Pajak Daerah
Tahun 2016

Keterangan	Target	Realisasi	Persentase
Pajak Hotel	718.000.000,00	828.299.205,00	115,36%
Pajak Restoran	5.167.000.000,00	6.401.568.146,00	123,89%
Pajak Hiburan	164.419.500,00	212.748.828,00	129,39%
Pajak Reklame	428.250.000,00	615.837.793,00	143,80%
Pajak Penerang Jalan	20.800.000.000,00	23.321.171.504,00	112,12%
Pajak Air Tanah	30.000.000,00	32.518.761,00	108,40%
Pajak Sarang Burung Wallow	45.000.000,00	53.150.000,00	118,11%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.550.000.000,00	8.092.617.027,00	107,19%
Pajak Bumi dan Bangunan	11.865.297.510,00	8.229.609.039,00	69,36%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.000.000.000,00	5.161.130.379,50	103,22%
Total	51.767.967.010,00	52.948.650.682,50	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim

Dari tabel 1.4 dapat dilihat pada tahun 2016 pajak daerah yang tidak mencapai target yaitu, pajak bumi dan bangunan dengan persentase 69,36%, dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Tabel 1.5
Target dan Realisasi Pajak Daerah
Tahun 2017

Keterangan	Target	Realisasi	Persentase
Pajak Hotel	823.000.000,00	947.926.660,00	115,18%
Pajak Restoran	5.970.000.000,00	6.177.067.017,00	103,47%
Pajak Hiburan	272.000.000,00	285.362.389,00	104,91%
Pajak Reklame	513.750.000,00	754.966.608,00	146,95%
Pajak Penerang Jalan	7.200.000.000,00	29.389.067.371,00	408,18%
Pajak Air Tanah	35.000.000,00	41.341.568,00	118,12%
Pajak Sarang Burung Wallow	50.000.000,00	62.708.800,00	125,42%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.500.000.000,00	7.251.517.066,00	111,56%
Pajak Bumi dan Bangunan	11.983.029.302,00	9.056.378.146,00	75,58%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	7.500.000.000,00	8.752.208.771,53	116,70%
Total	56.346.779.302,00	62.718.676.208,53	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim

Dari tabel 1.5 dapat dilihat pada tahun 2017 pajak daerah yang tidak mencapai target yaitu, pajak bumi dan bangunan dengan persentase 75,528%, dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Tabel 1.6
Target dan Realisasi Pajak Daerah
Tahun 2018

Keterangan	Target	Realisasi	Persentase
Pajak Hotel	1.225.815.688,00	1.417.001.166,00	115,60%
Pajak Restoran	6.900.468.000,00	7.371.460.935,00	106,83%
Pajak Hiburan	257.003.864,00	242.333.217,00	94,29%
Pajak Reklame	738.050.000,00	753.526.602,00	102,10%
Pajak Penerang Jalan	29.962.000.000,00	32.390.419.189,00	108,10%
Pajak Air Tanah	50.000.000,00	243.706.068,00	487,41%
Pajak Sarang Burung Wallow	55.000.000,00	59.412.000,00	108,02%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.500.000.000,00	12.457.231.407,00	191,65%
Pajak Bumi dan Bangunan	11.693.745.529,00	9.346.051.075,00	79,92%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	38.000.000.000,00	4.756.830.416,62	12,52%
Total	95.383.083.081,00	69.037.972.075,62	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim

Dari tabel 1.6 dapat dilihat pada tahun 2018 pajak daerah yang tidak mencapai target yaitu, pajak bumi dan bangunan dengan persentase 79,92%, dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditahun 2018 tidak mencapai target sebesar 12,52%. Berdasarkan wawancara tidak tercapainya dikarenakan saat ini masyarakat cenderung menjual asset dibandingkan membeli tanah dan rumah, masyarakat cenderung malas karena ekonomi yang menurun.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah

yang sah merupakan komponen penting dalam pendapatan asli daerah, maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “**Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pokok pikiran yang dituangkan dalam Latar Belakang Masalah, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini :

1. Bagaimanakah penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimanakah upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis atas penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin penulis harapkan atas penelitian yang sudah dilakukan akan bermanfaat bagi :

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan serta menambah wawasan dan pengetahuan dalam penerapan ilmu ekonomi. Khususnya mengenai segala sesuatu tentang pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim.

2. Bagi Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi perusahaan dan diharapkan dapat memberi pemikiran, saran serta informasi pendapatan daerah. Dan diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta dapat menambah pengetahuan, menjadi sumber informasi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Bustamar Ayza. (2017).*Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: KENCANA
- Elvi Syahria Maznawaty, Ventje Ilat, Inggriani Elim, 2015. Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara <https://media.neliti.com/media/publications/2753-ID-analisis-penerimaan-pajak-daerah-dalam-meningkatkan-pendapatan-asli-daerah-provi.pdf>. ISSN 2303-11.
- <https://jojonomic.com/blog/pendapatan-asli-daerah/>
- Mardiasmo, 2016, Perpajakan *Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta : Penerbit ANDI
- Muhammad Iqbal, Widhi Sunardika, 2018. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009 – 2015). Jurnal Ilmiah Akuntansi Volume 9, Nomor 1, hlm.10-35 Januari-April 2018 ISSN 2086-4159. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- Nurhayati, 2016. Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Perkapita Kota Jambi. e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 5. No.1, Januari – April 2016 ISSN: 2303-1255 (online).
- Profil Pajak Daerah.2017. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim
- Putri Dyah Ayu Lestari,2017. Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat Stabat. <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/8494/1/138330020.pdf>
- Sekaran, Uma. 2017. *Metodelogi Penelitian untuk Bisnis*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono,2015.*Metodelogi Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta.Bandung.
- Sugiyono,2017.*Metodelogi Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta.Bandung.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentag Ketentuan Umum dan Tata Cara Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157. Sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah.

Uma dan Bougie.2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Selemba Empat, Cetakan Kedua.

V. Wiratna Sujarweni, 2015. *Metodelogi penelitian bisnis & ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit PT. Pustaka Baru.

Waluyo, 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat

